

Dinamika Wacana Pengungsi di Media Sosial: Tantangan dan Peluang Reformulasi Kebijakan Migrasi di Indonesia

Mohamad Rizki Ramadhan^{1*}, Muhammad Syaroni Rofii², Jelang Ramadhan³,
Alhamudin Maju Hamonangan Sitorus⁴

*Corresponding Author: rizki.ramadhann97@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v11i2.39394

Abstract

The phenomenon of global migration has given rise to diverse discourses on refugees across social media platforms, significantly influencing the direction of migration policy. This article adopts James Milner's global refugee policy framework to analyze the dynamics of refugee issues in Indonesia. Using a digital discourse analysis approach, this study examines how narratives on social media shape public perception, impacting national social, economic, and political stability. Distinct from previous studies, this research highlights the novelty of employing digital research methods to explore the intersection of online discourse, migration policy reform, and national resilience. The findings reveal that the dynamic nature of public narratives poses significant challenges for the government in formulating fair and responsive policies. This study emphasizes the importance of multi-actor involvement in developing inclusive migration policies. A synergy between the state and civil society is essential to produce policies that not only safeguard national interests but also uphold the fundamental rights of refugees and promote adaptive responses to global migration dynamics.

Abstrak

Fenomena migrasi global telah mendorong munculnya berbagai wacana tentang pengungsi di media sosial, yang secara signifikan memengaruhi arah kebijakan migrasi. Artikel ini mengadopsi kerangka kebijakan pengungsi global dari James Milner untuk menganalisis dinamika isu pengungsi di Indonesia. Melalui pendekatan analisis wacana digital, studi ini menelaah bagaimana narasi di media sosial membentuk persepsi publik yang berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional. Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini menekankan kebaruan pada pemanfaatan riset digital untuk mengeksplorasi keterkaitan antara wacana daring, reformasi kebijakan migrasi, dan penguatan ketahanan nasional. Temuan menunjukkan bahwa dinamika narasi publik menghadirkan tantangan signifikan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan responsif. Studi ini merekomendasikan pentingnya peran multi-aktor dalam menyusun kebijakan migrasi yang inklusif. Sinergi antara negara dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga menjamin hak-hak dasar pengungsi serta mendorong respons yang adaptif terhadap dinamika global.

Keywords

diskursus publik, kebijakan migrasi, media sosial, pengungsi

Article History

Received January, 10

Revised June, 7

Accepted June, 16

Published June, 17

Corresponding Author

Universitas Indonesia. Jl.
Lingkar, Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok,
Jawa Barat, 16424.

Pendahuluan

Berdasarkan data dari UNHCR, antara Januari hingga Desember 2023, terdapat 1.752 pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah Indonesia melalui perjalanan laut. Mereka diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Utara, menandakan Indonesia sebagai salah satu tujuan transit utama bagi pengungsi Rohingya (UNHCR, 2024). Pada akhir tahun 2023, jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 12.295 orang (UNHCR, 2024). Dari jumlah tersebut, sebanyak 69% merupakan orang dewasa, sedangkan 29% adalah anak-anak. Komposisi penduduk dewasa menunjukkan dominasi laki-laki, yang mencapai 72%, sementara perempuan hanya 28%. Data ini mencerminkan ketimpangan gender dalam populasi dewasa pengungsi, yang terkait dengan dinamika sosial, politik, atau risiko yang dihadapi di wilayah asal mereka. Seharusnya prioritas untuk menjadi pengungsi adalah mereka yang Perempuan dan anak-anak.

Setelah kedatangan pengungsi Rohingya ini, populasi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berjumlah sekitar 10.543 orang. Sebagian besar berasal dari Afghanistan (5.980 orang), diikuti oleh Myanmar (2.063 orang), Somalia (1.170 orang), Irak (536 orang), dan Yaman (449 orang) (UNHCR, 2024). Sisanya berasal dari berbagai negara lain. Distribusi ini menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan di negara asal menjadi pendorong utama migrasi paksa ke Indonesia.

Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa peluang untuk masuknya para pengungsi, terutama dari negara-negara konflik terus berlanjut di masa yang akan datang. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa salah satu alasan Indonesia dipilih sebagai negara transit oleh para pengungsi adalah karena persamaan agama yang dianut, seperti agama Islam. Dapat dilihat dari asal pengungsi yang masuk ke Indonesia adalah mereka yang berasal dari negara-negara dengan mayoritas penganut agama Islam.

Sejak krisis pengungsi tahun 2015, lebih dari 13.500 pencari suaka telah memasuki wilayah Indonesia (Missbach, 2019). Selain itu, sejumlah besar pencari suaka dari Myanmar, khususnya etnis Rohingya, terus memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, yang memberikan akses bebas visa bagi warga dari 169 negara, permasalahan terkait isu pengungsi menjadi lebih kompleks. Banyak pencari suaka memasuki Indonesia dengan status turis dan kemudian mendeklarasikan diri sebagai pencari suaka di wilayah Indonesia (Syahrin & Pangestu, 2019). Kebijakan ini memunculkan fenomena baru, di mana jumlah pencari suaka yang masuk ke Indonesia meningkat pesat, sebagaimana terlihat dari banyaknya individu yang menyatakan status pencari suaka setelah berada di wilayah Indonesia.

Keberadaan para pengungsi, baik di negara tujuan maupun negara transit memberikan pengalaman yang beragam. Pengalaman ini berdampak kepada para pengungsi maupun negara penampung para pengungsi itu sendiri. Bagi para pengungsi, pengalaman selama berada di negara-negara transit ataupun tujuan lebih menekankan pada kondisi dan masa depan para pengungsi. Seperti studi yang dilakukan oleh Fiske (2023) yang menunjukkan bahwa para pengungsi kehilangan "waktu" mereka. Realitas yang dihadapi pengungsi, yaitu mereka sering hidup dalam ketidakpastian atau "limbo" selama rata-rata 17 tahun. Kondisi ini dianggap sebagai waktu yang "hilang" atau "terbuang" (Fiske, 2023).

Kehilangan waktu ini memberikan kesenjangan dan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di masa depan. Sementara, bagi negara penampung, berbagai masalah muncul akibat

keberadaan pengungsi, seperti perbedaan budaya dan pelanggaran nilai dan norma terhadap warga sekitar yang dilakukan oleh oknum pengungsi, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat (Kurniawati et al., 2022).

Selanjutnya, masalah pengungsi ini merupakan isu global yang tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis di Asia Tenggara, Indonesia sering kali menjadi tempat transit bagi para pengungsi yang mencari perlindungan dari konflik, persekusi, dan kondisi ekonomi yang buruk di negara asal mereka (MMC, 2021). Namun, hingga saat ini, Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang membatasi peran dan kewajiban negara dalam menangani arus pengungsi (Gunawan et al., 2024). Di tengah keterbatasan kebijakan formal tersebut, wacana mengenai pengungsi semakin mengemuka di ruang publik, terutama di media sosial, yang membuka ruang diskusi baru dan beragam sudut pandang mengenai isu ini.

Beberapa studi terdahulu tentang pengungsi, terutama di negara-negara transit cenderung membahas tentang permasalahan yang kompleks terkait kehidupan pengungsi di negara-negara transit. Pengungsi sering kali harus menempuh perjalanan yang penuh tantangan menuju negara tujuan. Masa tunggu di negara-negara transit menambah kemungkinan hambatan dalam proses integrasi ekonomi mereka di negara penerima (Kuhn, 2023). Selain itu, pengungsi di bawah umur juga rentan mengalami kualitas hidup yang buruk, terutama mereka yang merupakan anak-anak pengungsi tanpa pendamping (Barn et al., 2021; Kallinikaki, 2023).

Pengungsi sering kali menghadapi perjalanan yang sangat berbahaya dan penuh risiko dalam upaya mencapai negara tujuan. Perjalanan ini bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga mental, karena melibatkan ketidakpastian dan sering kali menghadapi mereka pada eksploitasi oleh penyelundup manusia. Ketika mencapai negara transit, masa tunggu yang lama menjadi ujian tambahan, sering kali memperburuk situasi mereka secara ekonomi dan sosial. Masa tunggu ini dapat menyebabkan pengungsi terjebak dalam ketergantungan pada bantuan kemanusiaan tanpa akses yang memadai ke pekerjaan atau pendidikan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi di negara penerima.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan pengungsi juga mengalami berbagai problematika. Studi-studi sebelumnya tentang pengungsi di Indonesia menekankan pada tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) para pengungsi. Meskipun tidak memiliki tanggung jawab terhadap status pengungsi karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, Indonesia masih terikat pada pemenuhan HAM sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Gunawan et al., 2024). Justifikasi kebijakan Indonesia dalam hal ini didasarkan pada interpretasinya terhadap kedaulatan negara sebagai otoritas perlindungan yang bersifat kemanusiaan dan non-diskriminatif (Puspita, 2024). Studi lainnya berkaitan dengan permasalahan pengungsi di Indonesia secara spesifik membahas tentang implementasi pemenuhan HAM pada pengungsi, seperti memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak pengungsi (Astariyani et al., 2023; Prabaningtyas et al., 2023; Rumiarta & Jayantiari, 2023).

Sementara itu, pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 lalu, media sosial Indonesia sempat ramai membahas isu pengungsi Rohingya, khususnya di wilayah Aceh. Sentimen negatif terkait pengungsi Rohingya di Aceh muncul terkait keberadaan mereka yang membebani warga, seperti unggahan terkait pengungsi yang minta makan di tengah kondisi rakyat Indonesia yang

masih butuh perhatian pemerintah (Lestari, 2023). Di sisi lain, UNHCR menilai bahwa respon masyarakat di ranah media kepada pengungsi dipicu oleh unggahan kebencian terselubung (Dewi, 2023), yang pada akhirnya merusak upaya Indonesia dalam menerapkan pemerintahan yang humanitarian.

Terlepas dari pemberitaan media massa terkait isu pengungsi yang kontradiktif, pembahasan isu ini di media sosial menjadi salah satu langkah penting. Media sosial menawarkan peluang baru untuk mengumpulkan berbagai macam konten yang sangat banyak dan beragam (Andreotta et al., 2019). Pembahasan isu pengungsi di media sosial menjadi salah satu representasi aspirasi masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam pemetaan masalah. Selain itu, beberapa studi sebelumnya yang menggunakan media sosial sebagai medium analisis tentang pengungsi hanya fokus pada permasalahan yang dialami pengungsi dibandingkan konteks kebijakan dan ketahanan nasional (Aldamen, 2023; Yılmaz et al., 2023).

Artikel ini secara khusus memetakan dinamika wacana terkait pengungsi di ranah media sosial, khususnya media sosial Threads yang menjadi salah satu medium aspirasi masyarakat. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih fokus pada wacana publik tentang isu pengungsi (McCann et al., 2023; Sutkutè, 2019), artikel ini memberikan fokus baru dalam analisis ketahanan nasional, khususnya pada peluang reformulasi kebijakan penanganan pengungsi. Identifikasi terhadap isu dan permasalahan pengungsi di Indonesia di ruang media sosial ini menjadi salah satu medium dalam mengetahui tantangan dan peluang terhadap kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, namun harus patuh pada Deklarasi HAM, maka dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Artinya, penanganan isu ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia terhadap para pengungsi.

Studi ini mengisi gap dalam penelitian sebelumnya yang hanya cenderung membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh pengungsi. studi ini menggunakan kerangka teori Milner (2014) untuk memberikan kerangka analisis yang relevan dalam memahami dinamika kebijakan pengungsi di Indonesia melalui media sosial. Media sosial telah mengubah cara kita berdiskusi dan berinteraksi seputar isu ini, membuka peluang untuk reformulasi kebijakan yang lebih inklusif dan manusiawi, serta memperhatikan stabilitas ketahanan negara. Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dinamika wacana pengungsi di media sosial mencerminkan tantangan dan peluang dalam perumusan kebijakan pengungsi di Indonesia sebagai negara transit? Kemudian, penelitian ini juga mencoba mengungkap sejauh mana representasi isu pengungsi di media sosial dapat digunakan sebagai instrumen strategis dalam formulasi kebijakan yang menyeimbangkan perlindungan hak asasi pengungsi dan stabilitas ketahanan nasional.

Untuk memberikan alur pembahasan yang sistematis, artikel ini disusun dalam beberapa bagian yang saling berkaitan. Setelah bagian pendahuluan, bagian kedua menjelaskan kerangka konseptual yang merujuk pada teori kebijakan pengungsi global dari James Milner dan konsep public sphere dari Jürgen Habermas, yang digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dan keterlibatan digital dalam isu pengungsi. Bagian ketiga menguraikan metode penelitian, khususnya penggunaan analisis wacana digital dengan data yang diperoleh dari platform media sosial. Bagian keempat menyajikan temuan penelitian, dengan fokus pada bagaimana narasi tentang pengungsi memengaruhi sentimen publik dan beririsan dengan tantangan ketahanan nasional. Selanjutnya,

bagian diskusi membahas implikasi temuan terhadap peluang reformulasi kebijakan migrasi di Indonesia sebagai negara transit. Artikel ini ditutup dengan bagian kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Kerangka Konseptual

Wacana pengungsi di media sosial semakin dinamis, melibatkan berbagai pihak dengan sudut pandang yang beragam. Media sosial menjadi arena baru bagi pembentukan opini publik, ketika narasi tentang pengungsi bisa bergeser dari solidaritas kemanusiaan hingga retorika xenofobia. Untuk memahami kompleksitas ini, teori James Milner (2014) tentang "hubungan kekuasaan dalam pengungsi dan kebijakan migrasi" menjadi relevan. Milner menyoroti bagaimana kekuasaan antara aktor negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat membentuk kebijakan pengungsi, khususnya dalam konteks negara-negara yang bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 seperti Indonesia.

Milner (2014) mendefinisikan kebijakan pengungsi global sebagai respons formal terhadap masalah perlindungan, solusi, atau bantuan untuk pengungsi dan populasi terkait. Kebijakan ini meliputi regulasi dan program yang dikelola oleh badan internasional untuk memberikan panduan perilaku bagi pemerintah dan aktor lain. Kebijakan pengungsi global sering kali berinteraksi dengan kebijakan lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Milner mencatat bahwa inisiatif informal dan kebijakan paralel, dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan global.

Media sosial sebagai salah satu ranah diskursif modern menjadi tempat signifikan untuk memahami dinamika wacana yang memengaruhi kebijakan global dan nasional terkait pengungsi. Kebijakan pengungsi global tidak hanya berupa produk formal, tetapi juga proses (Milner, 2014). Dalam konteks ini, media sosial berperan dalam tahap agenda-setting, yaitu tahap di mana isu pengungsi mulai diperhatikan oleh pembuat kebijakan melalui tekanan publik atau narasi yang berkembang. Dalam kebijakan pengungsi global, narasi sering kali bersaing untuk menonjol di agenda pembuat kebijakan (Milner, 2014). Media sosial menciptakan ruang untuk berbagai narasi, mulai dari empati terhadap pengungsi hingga sentimen anti-pengungsi, yang semuanya memengaruhi formulasi kebijakan.

Selain itu, teori *public sphere* dari Jürgen Habermas dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana media sosial membentuk wacana dan memengaruhi kebijakan pengungsi. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi ruang deliberatif tempat berbagai aktor mengartikulasikan opini, tetapi juga menjadi arena kontestasi kebijakan secara *real-time* (Latif et al., 2024). Media sosial memungkinkan pemantauan opini publik secara langsung, membuka ruang interaksi antara pembuat kebijakan dan warga, serta membantu mengidentifikasi isu-isu yang sedang berkembang pada tahap awal. Pemerintah pun semakin responsif terhadap sentimen publik yang muncul di platform digital, baik untuk menjaga legitimasi, meningkatkan transparansi, maupun merespons krisis (Sha et al., 2023).

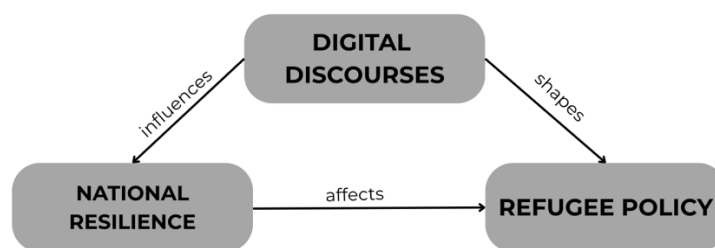
Selanjutnya, Milner (2014) juga menegaskan bahwa relasi kekuasaan dalam isu pengungsi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan resmi negara, tetapi juga oleh kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas, termasuk peran masyarakat sipil dan opini publik. Dalam konteks Indonesia, wacana pengungsi di media sosial mencerminkan dinamika kekuasaan yang terfragmentasi. Di satu sisi, pemerintah berusaha mengelola arus pengungsi berdasarkan

kepentingan keamanan dan politik domestik. Di sisi lain, berbagai kelompok masyarakat, baik yang mendukung perlindungan pengungsi maupun yang menolak keberadaan mereka, terlibat aktif dalam menciptakan narasi di media sosial.

Kemudian, Milner (2014) mengidentifikasi aktor dalam kebijakan pengungsi, termasuk negara, organisasi internasional seperti UNHCR, dan NGO. Dalam konteks media sosial, aktor ini diperluas mencakup masyarakat umum, aktivis, dan media, yang dapat memengaruhi diskursus publik terkait isu pengungsi.

Media sosial menjadi instrumen penting dalam perebutan wacana tentang pengungsi. Milner menekankan bahwa aktor non-negara, seperti LSM dan kelompok masyarakat, memiliki kemampuan untuk menggeser perdebatan publik melalui akses terhadap platform digital. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam kampanye-kampanye yang mendukung hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi. Beberapa LSM internasional maupun lokal menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi pengungsi yang terjebak di Indonesia, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan lebih proaktif. Menurut Milner, aktor-aktor ini menggunakan media sebagai "counter-power" untuk menantang narasi dominan yang sering kali didorong oleh ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap pengungsi.

James Milner (2014) mengakui bahwa kebijakan pengungsi sering kali dipengaruhi oleh opini publik dan konteks politik lokal. Sentimen negatif yang menyebar luas, seperti ancaman keamanan, ekonomi, dan budaya, dapat memperkuat kebijakan yang lebih restriktif. Media sosial juga membuka peluang reformulasi kebijakan migrasi yang lebih humanis, sesuai dengan pandangan Milner, bahwa aktor non-negara dapat mengubah relasi kekuasaan dalam perumusan kebijakan. Milner berpendapat bahwa semakin besar dukungan yang diperoleh dari masyarakat sipil, semakin besar peluang untuk menantang kebijakan yang eksklusif dan diskriminatif.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Olahan Penulis)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika wacana pengungsi di media sosial dalam konteks kebijakan imigrasi di Indonesia. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap narasi dan interaksi yang terjadi di platform media sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, pola, dan struktur wacana yang berkembang serta bagaimana hal tersebut memengaruhi proses formulasi kebijakan imigrasi di tingkat nasional.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data digital dari platform media sosial Threads. Pemilihan platform Threads sebagai sumber data utama dalam

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan analitis dan demografis yang signifikan. Secara analitis, Threads menawarkan format interaksi yang memungkinkan diskusi yang lebih mendalam karena tidak memiliki batasan karakter seketat platform X (sebelumnya Twitter). Hal ini memungkinkan pengguna mengembangkan argumen atau opini secara lebih komprehensif, sehingga memperkaya kualitas wacana yang dapat dianalisis. Threads juga memiliki fitur struktur percakapan berantai yang memudahkan pelacakan alur diskusi dan dinamika interaksi antar pengguna.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "pengungsi?", "refugee," dan "kebijakan pengungsi." Terdapat 18.374 kata dari total 214 unggahan yang dikumpulkan dari Threads berdasarkan kata kunci tersebut. Data yang dikumpulkan mencakup periode satu tahun terakhir (tahun 2024), tepatnya saat isu-isu terkait keberadaan pengungsi tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Selain itu, alat bantu seperti perangkat lunak Nvivo, digunakan untuk mengelola data secara sistematis dan efisien, dengan tetap memperhatikan etika penelitian, termasuk anonimitas dan privasi pengguna. Visualisasi data menggunakan wordcloud.

Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis isi untuk memahami konteks narasi wacana, serta analisis teks weighted untuk mengidentifikasi aktor kunci dan pola interaksi dalam diskusi media sosial. Analisis teks atau isi dilakukan melalui wordcloud untuk mengidentifikasi tema-tema utama (Segev, 2020), seperti dukungan terhadap pengungsi atau resistensi terhadap kebijakan migrasi.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai platform media sosial dan sumber lainnya, seperti laporan NGO atau media massa terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara iteratif untuk memastikan konsistensi antara temuan awal dengan pola yang muncul selama proses penelitian. Hasil analisis ini diharapkan memberikan wawasan yang kaya mengenai dinamika wacana pengungsi di media sosial dan kontribusinya terhadap perumusan kebijakan migrasi di Indonesia.

Ketahanan Nasional dalam Krisis Pengungsi

Krisis pengungsi Rohingya yang melibatkan Indonesia sebagai negara transit menciptakan tantangan multidimensional terhadap ketahanan nasional, yang dalam perspektif James Milner (2014) tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural sistem pengungsi global yang timpang. Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan tidak memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani pengungsi, Indonesia menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, Indonesia dituntut untuk memenuhi kewajiban kemanusiaan. Sementara itu, di sisi lain dibatasi oleh keterbatasan kapasitas domestik, kurangnya dukungan internasional, dan resistensi sosial-politik di tingkat lokal. Milner (2014) menjelaskan bahwa negara transit kerap berada dalam posisi dilematis, menanggung beban tanggung jawab perlindungan tanpa memiliki alat atau sumber daya yang memadai. Hal ini akhirnya memunculkan ketegangan internal dalam berbagai dimensi ketahanan nasional. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga dimensi dalam memahami posisi ketahanan nasional terhadap isu pengungsi, seperti yang disampaikan Milner (2014), yaitu dimensi keamanan; dimensi sosial-budaya; dan dimensi ekonomi.

a. Dimensi Keamanan: Negara dalam Tekanan Ancaman Non-Tradisional

Arus masuk pengungsi Rohingya membawa implikasi terhadap ketahanan keamanan Indonesia. Ketidakstabilan di Myanmar dan potensi jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan pengungsi menjadi ancaman langsung. Dugaan adanya sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan rute migrasi melalui wilayah Indonesia menuntut penguatan sistem pengawasan perbatasan dan kerja sama antar instansi, termasuk TNI, Polri, dan badan imigrasi. Kegagalan mengatasi ancaman ini dapat memicu pelanggaran hukum, konflik antar warga, dan ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

b. Dimensi Sosial-Budaya: Antara Solidaritas dan Resistensi Lokal

Keberadaan pengungsi juga memengaruhi ketahanan sosial-budaya di wilayah-wilayah penerima, seperti Aceh. Di satu sisi, solidaritas masyarakat lokal terhadap pengungsi menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya gotong royong yang kuat. Namun, di sisi lain, ada resistensi dari sebagian masyarakat yang khawatir terhadap dampak pengungsi pada ketersediaan lapangan kerja, tekanan fasilitas publik, dan kemungkinan konflik budaya. Tanpa edukasi dan komunikasi yang efektif, resistensi ini dapat memicu fragmentasi sosial dan mengganggu kohesi nasional.

c. Dimensi Ekonomi

Dampak ekonomi dari gelombang pengungsi juga menjadi perhatian penting. Pengungsi yang tinggal dalam jangka waktu lama dapat menambah beban pada sumber daya lokal, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Ketahanan ekonomi daerah yang sudah rentan, terutama di wilayah seperti Aceh, bisa terganggu jika pemerintah pusat tidak memberikan alokasi bantuan yang memadai. Namun, jika dikelola dengan baik, kehadiran pengungsi juga bisa menjadi peluang, misalnya melalui program-program pemberdayaan yang melibatkan pengungsi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Indonesia sebagai Negara Transit: Keterbatasan Struktural dan Tekanan Ganda

Dalam konteks teori Milner (2014) tentang kebijakan pengungsi, Indonesia dapat dilihat sebagai "negara transit" yang mengalami tekanan ganda: kebutuhan mendesak untuk memenuhi standar kemanusiaan dan keterbatasan sumber daya serta dukungan politik domestik. Teori ini juga menyoroti pentingnya aktor internasional, seperti UNHCR, yang bekerja sama dengan pemerintah lokal dalam menangani pengungsi. Namun, meski ada bantuan, upaya ini sering terkendala kurangnya koordinasi yang efektif dan resistensi lokal.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menangani pengungsi akibat dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memanfaatkan situasi pengungsi. Milner (2014) menyebutkan bahwa dinamika seperti ini sering terjadi di negara transit, di mana terdapat regulasi yang tidak efisien memperburuk kerentanan pengungsi. Resistensi lokal di Aceh menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan untuk melindungi pengungsi dan kekhawatiran terhadap dampak negatif seperti persaingan ekonomi dan potensi konflik sosial. Media sosial memperlihatkan bahwa narasi negatif ini dapat berkembang, meskipun ada juga solidaritas masyarakat yang memperjuangkan bantuan kemanusiaan.

Indonesia berperan sebagai negara transit bagi pengungsi Rohingya, yang tidak menjadikan Indonesia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai tempat sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara ketiga. Milner mencatat bahwa negara transit sering kali

mengalami beban yang tidak seimbang karena sistem pengungsi global mengutamakan tanggung jawab negara asal dan negara penerima akhir. Dalam kasus Rohingya, Indonesia harus menangani dampak sosial-ekonomi dari kedatangan lebih dari 2.288 pengungsi di Aceh tanpa dukungan penuh dari negara donor atau sistem internasional yang terstruktur. Keterbatasan ini diperburuk oleh kurangnya ratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi oleh Indonesia, sehingga pendekatan kebijakan lebih bersifat *ad hoc* dan sementara.

Peran imigrasi Indonesia dalam konteks pengungsi Rohingya mencerminkan tantangan sistemik yang sering terjadi dalam pengelolaan migrasi global. Sebagai negara transit, Indonesia berada di persimpangan antara kewajiban kemanusiaan, kebutuhan domestik, dan tekanan internasional. Untuk mengelola tantangan ini secara efektif, reformasi kebijakan diperlukan dengan mengutamakan kolaborasi multi-aktor serta respons yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan hukum.

Peran Aktor Internasional: Antara Dukungan dan Fragmentasi Koordinasi

Milner (2014) menggarisbawahi pentingnya peran aktor internasional seperti UNHCR dalam bekerja sama dengan negara transit untuk memperkuat kebijakan dan sistem pengelolaan pengungsi. Media sosial di Indonesia, meskipun penuh dinamika, dapat menjadi alat penting untuk mendukung reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Kampanye solidaritas terhadap pengungsi dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi yang humanis dan meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah untuk menciptakan kebijakan migrasi yang berimbang antara aspek keamanan dan kemanusiaan.

Kolaborasi dengan aktor internasional seperti UNHCR, IOM (*International Organization for Migration*), dan LSM lokal menjadi elemen kunci untuk mengelola arus pengungsi. Aktor-aktor ini dapat membantu dalam menyediakan bantuan logistik, pendampingan hukum, dan advokasi kebijakan. Namun, Milner (2014) menyoroti bahwa keberhasilan kolaborasi ini tergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional. Dalam konteks Rohingya, koordinasi ini sering kali terkendala oleh perbedaan prioritas dan pendekatan.

Media Sosial dan Reformulasi Kebijakan Pengungsi

Perhatian tentang dampak pengungsi terhadap ketahanan nasional dapat dibahas secara mendalam melalui dinamika wacana pengungsi di kalangan masyarakat, salah satunya melalui media sosial sebagai medium komunikasi dan wadah aspirasi masyarakat. Dinamika wacana pengungsi di media sosial Indonesia pada 2023 menunjukkan pergeseran isu dari sekadar bantuan kemanusiaan menjadi perdebatan soal dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Gelombang besar kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh sepanjang 2023 menimbulkan perhatian luas, dengan lebih dari 2.288 pengungsi tiba dalam tahun itu, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketidakstabilan di Myanmar dan kondisi buruk di kamp pengungsi Bangladesh menjadi pendorong utama migrasi ini. Namun, masalah ini semakin kompleks dengan dugaan adanya jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan situasi para pengungsi untuk keuntungan ilegal.

Media sosial memainkan peran penting dalam membingkai narasi ini. Warga Aceh, misalnya, mengunggah aksi solidaritas seperti membagikan makanan, tetapi juga menyuarakan kekhawatiran terhadap konflik sosial dan tekanan ekonomi lokal akibat kedatangan pengungsi. Sentimen ini mengilustrasikan bagaimana media sosial menjadi arena negosiasi wacana, di mana berbagai perspektif dari solidaritas hingga penolakan bertemu. Pemerintah Indonesia sendiri mengambil sikap dualistis dengan menawarkan bantuan sementara tetapi juga menegaskan bahwa pengungsi hanya diterima secara temporer. Presiden Jokowi bahkan menyoroti keterlibatan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini.

Media sosial juga mengungkap peluang reformulasi kebijakan. Kampanye solidaritas di media sosial menunjukkan potensi mobilisasi publik untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif. Sebaliknya, kritik terhadap pengelolaan pengungsi menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta langkah-langkah untuk mengatasi faktor struktural seperti perdagangan manusia dan konflik domestik di negara asal pengungsi.

Terlepas dari isu tersebut, dinamika wacana masyarakat di ranah media sosial memberikan interpretasi yang menarik. Berdasarkan analisis isi dari wacana terkait pengungsi di media sosial, terdapat pergeseran sentimen, khususnya pada periode akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 dengan 4 bulan terakhir ini. Ketika isu terkait pengungsi Rohingya yang kembali mendarat di Aceh pada akhir 2023 lalu, unggahan masyarakat di media sosial cenderung memiliki sentimen yang negatif terhadap keberadaan pengungsi.



Gambar 2. WorldCloud Isu Pengungsi di Indonesia

Dinamika wacana terlihat dalam tiga bulan terakhir di media sosial. Isu terkait pengungsi menunjukkan respons yang positif dan menekankan pada pemberian bantuan dan penanganan yang tepat terhadap pengungsi, khususnya yang berasal dari Rohingya. Berdasarkan hasil analisis isi melalui *worldcloud*, hal ini dipicu oleh konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Perhatian masyarakat Indonesia menjadi lebih empati terhadap para pengungsi di Gaza. Hal ini memberikan pengaruh terhadap pengungsi Rohingya sebagai sesama muslim yang butuh penanganan yang lebih baik dari pemerintah. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa kata-kata seperti “bantuan”, “korban”, “Rohingya” memiliki frekuensi paling besar dibandingkan kata-kata lainnya.

Isu ini juga mencerminkan ketegangan antara kebijakan migrasi berbasis keamanan versus kebijakan berbasis kemanusiaan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi masyarakat lokal dari dampak negatif; di sisi lain, ada kewajiban moral dan hukum internasional untuk melindungi pengungsi. Wacana ini menggarisbawahi tantangan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, resistensi masyarakat lokal di Aceh menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak sosial-ekonomi, seperti persaingan pekerjaan dan potensi konflik sosial. Narasi ini berkembang di media sosial, yang menunjukkan sentimen negatif terhadap pengungsi pada periode tertentu. Untuk mengatasi resistensi ini, kebijakan yang lebih inklusif dan edukasi publik tentang hak-hak pengungsi serta dampak positif dari solidaritas diperlukan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya penggunaan media sosial sebagai alat untuk membangun narasi yang lebih positif.

Dinamika internasional, seperti konflik Palestina-Israel yang meningkatkan empati terhadap pengungsi, menunjukkan bahwa kebijakan migrasi harus responsif terhadap perubahan sentimen global. Selain itu, konflik domestik di negara asal pengungsi, seperti Myanmar, menuntut Indonesia untuk berperan aktif dalam diplomasi regional melalui ASEAN untuk menyelesaikan akar masalah migrasi.

Berdasarkan analisis di atas, kami menilai bahwa media sosial pada dasarnya dapat menjadi alat strategis dalam melakukan reformulasi kebijakan, baik sebagai medium edukasi publik maupun untuk memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penggunaan narasi yang lebih humanis dan inklusif di platform ini dapat membantu mengurangi stigma terhadap pengungsi dan mempromosikan pendekatan yang lebih berimbang. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu bagaimana menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan geopolitik dan tren migrasi global. Seperti yang dikemukakan Milner, keterlibatan aktor non-negara seperti LSM dan organisasi internasional diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Kolaborasi ini harus melibatkan media sosial sebagai alat untuk mendukung dialog dan partisipasi masyarakat luas.

Dinamika ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pendekatan holistik dalam kebijakan pengungsi. Tidak hanya mengatasi tantangan jangka pendek tetapi juga membangun sistem yang mendukung integrasi dan keberlanjutan, yang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi multi-aktor dan komunikasi yang efektif di berbagai level kebijakan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peluang reformulasi kebijakan migrasi yang berkaitan dengan pengungsi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Reformulasi ini dapat mencakup pendekatan multidimensi yang melibatkan aktor nasional dan internasional. Langkah pertama yang penting adalah menyusun regulasi domestik yang memberikan kepastian hukum terhadap status pengungsi. Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sehingga penanganan pengungsi kerap bersifat ad hoc dan bergantung pada kebijakan sementara. Regulasi yang jelas akan memungkinkan pemerintah untuk mengelola pengungsi dengan standar yang lebih konsisten, sekaligus memperkuat legitimasi hukum di tingkat internasional.

Peluang berikutnya adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi titik kedatangan pengungsi, seperti Aceh. Koordinasi yang lebih baik dapat mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat respons penanganan pengungsi. Dalam hal ini, dukungan dari aktor internasional seperti UNHCR dan IOM menjadi

sangat penting. Mereka dapat membantu dalam penyediaan fasilitas sementara, layanan kesehatan, serta pemulihan psikososial pengungsi. Kolaborasi ini juga dapat memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan memenuhi standar internasional dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Media sosial juga menghadirkan peluang besar sebagai alat untuk mendukung reformasi kebijakan migrasi. Di satu sisi, media sosial dapat digunakan untuk mengedukasi publik tentang hak-hak pengungsi dan pentingnya solidaritas kemanusiaan. Kampanye-kampanye humanis dapat membantu meredam sentimen negatif yang sering muncul dalam diskusi daring. Di sisi lain, media sosial dapat berfungsi sebagai alat pemantauan kebijakan, memungkinkan masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah secara transparan. Narasi yang inklusif di media sosial dapat membangun dukungan publik yang lebih luas untuk kebijakan migrasi yang berbasis kemanusiaan.

Reformulasi kebijakan migrasi juga harus mencakup pendekatan diplomasi regional. Konflik di negara asal pengungsi, seperti Myanmar, menunjukkan perlunya Indonesia berperan aktif dalam kerangka ASEAN untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, pendekatan regional diperlukan untuk menangani faktor struktural seperti perdagangan manusia yang kerap melibatkan jaringan lintas negara. Dengan memimpin inisiatif diplomatik ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam pengelolaan migrasi di Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, peluang reformulasi kebijakan migrasi di Indonesia menawarkan jalan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis kolaborasi multi-aktor akan memungkinkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang. Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengatasi tantangan migrasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang humanis dan bertanggung jawab di tingkat global.

Kesimpulan

Dalam konteks teori Milner (2014) tentang kebijakan global pengungsi, Indonesia sebagai negara transit menghadapi tekanan ganda untuk memenuhi kewajiban internasional dan menjaga stabilitas domestik. Tantangan struktural seperti perdagangan manusia dan keterbatasan koordinasi kebijakan menjadi penghalang dalam penanganan pengungsi. Kontribusi utama studi ini terletak pada pengungkapan peran strategis media sosial dalam membentuk opini publik dan membuka ruang bagi reformasi kebijakan pengungsi yang lebih partisipatif di Asia Tenggara. Melalui pemanfaatan wacana digital sebagai alat advokasi dan edukasi, Indonesia memiliki peluang untuk membangun pendekatan kebijakan yang lebih responsif dan kolaboratif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi multi-aktor dalam menciptakan tata kelola pengungsi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika geopolitik kawasan.

Selain itu, reformulasi kebijakan migrasi di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang memanfaatkan potensi media sosial sebagai alat edukasi dan pengawasan. Narasi yang lebih inklusif dan humanis dapat mengurangi stigma terhadap pengungsi serta mempromosikan dialog lintas sektor. Kolaborasi dengan aktor internasional, LSM, dan pemerintah lokal menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang responsif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika

geopolitik serta tren migrasi global. Hal ini tidak hanya untuk menjawab tantangan jangka pendek tetapi juga membangun kebijakan yang mendukung integrasi dan keberlanjutan.

Meskipun penelitian ini sudah mengungkapkan bagaimana dinamika wacana publik di sosial media dapat memetakan tantangan dan peluang reformulasi kebijakan pengungsi, masih terdapat beberapa limitasi yang harus diperhatikan. Secara spesifik, studi ini hanya menggunakan Threads sebagai landasan dalam memetakan dinamika wacana pengungsi. Pendekatan komparatif dengan menggunakan media sosial lain sebagai perbandingan, seperti X, Facebook, Tiktok dapat memperkaya analisis di penelitian selanjutnya. Selain itu, studi komparatif terkait isu ini dalam konteks yang lebih luas, misalnya konteks *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) juga menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya.

Referensi:

- Aldamen, Y. (2023). Refugee Journalist Phenomenon as a Consequence of Migration and Refugee Crises: The Role of Social Media in Transferring Refugees' Role from "Has Been Affected" to "Has Affected." *Studies in Media and Communication*, 11(6), 358. <https://doi.org/10.11114/smc.v11i6.6202>
- Andreotta, M., Nugroho, R., Hurlstone, M. J., Boschetti, F., Farrell, S., Walker, I., & Paris, C. (2019). Analyzing Social Media Data: A Mixed-Methods Framework Combining Computational And Qualitative Text Analysis. *Behavior Research Methods*, 51(4), 1766–1781. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01202-8>
- Astariyani, N. L. G., Rumiarta, I. N. P. B., Ardani, N. K., & Kenevan, T. J. (2023). Policy on the Right to Education of Refugees in Indonesia and Australia. *Lex Scientia Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.62964>
- Barn, R., Di Rosa, R. T., & Kallinikaki, T. (2021). Unaccompanied Minors in Greece and Italy: An Exploration of the Challenges for Social Work within Tighter Immigration and Resource Constraints in Pandemic Times. *Social Sciences*, 10(4), 134. <https://doi.org/10.3390/socsci10040134>
- Dewi, S. (2023, December 29). UNHCR: Aksi Anarkis ke Pengungsi Rohingya Dipicu Kampanye Kebencian. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/news/world/santi->. Retrieved from idntimes.com: <https://www.idntimes.com/news/world/santi-dewi/unhcr-aksi-anarkis-ke-pengungsi-rohingya-dipicu-kampanye-kebencian>
- Fiske, L. (2023). Transforming Lost Time into Migration Capital: Hazara Refugee Social and Cultural Capital Development in Indonesia. *Journal of Refugee Studies*, 36(4), 917–936. <https://doi.org/10.1093/jrs/fead073>
- Gunawan, Y., Novendra, C. S., & Febrila, A. (2024). Indonesia's responsibility towards Rohingya refugees: analysis of the 1951 Refugee Convention. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 182–194. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.32164>
- Kallinikaki, T. (2023). The Lives of Unaccompanied Refugee Minors during their Transit Stay in Greece. *The International Journal of Social Quality*, 13(1), 56–72. <https://doi.org/10.3167/IJSQ.2023.130105>

- Kuhn, E. (2023). Journey Effects? Waiting Periods in European Transit Countries and Subsequent Economic Integration of Refugees in Switzerland. *International Migration Review*, 57(3), 1153–1183. <https://doi.org/10.1177/01979183221118325>
- Kurniawati, D., Elsera, M., & Wahyuni, S. (2022). Dampak Interaksi Sosial Antara Pengungsi Dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, 247–253.
- Latif, D., Samad, M. A., Rinawulandari, R., & Kadir, S. A. (2024). Social Media in Shaping Public Opinion Roles and Impact: A Systematic Review. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 40(2), 205–223. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2024-4002-12>
- Lestari, H. P. (2023, December 7). *Gejolak Media Sosial soal Pengungsi Rohingya: Kami Kerja, Mereka Datang Minta Makan*. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20231207/15/1721728/gejolak-media-sosial-soal-pengungsi-rohingya-kami-kerja-mereka-datang-minta-makan>
- McCann, K., Sienkiewicz, M., & Zard, M. (2023). *The role of media narratives in shaping public opinion toward refugees: a comparative analysis*. International Organization for Migration.
- Milner, J. (2014). Introduction: Understanding Global Refugee Policy. *Journal of Refugee Studies*, 27(4), 477–494. <https://doi.org/10.1093/jrs/feu032>
- Missbach, A. (2019). Asylum Seekers' and Refugees' Decision-Making in Transit in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 175, 419–445. <https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>
- MMC. (2021, May 27). *A Transit Country No More: Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*. MMC. <https://mixedmigration.org/resource/a-transit-country-no-more-refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/>
- Prabaningtyas, R. A. R. F., Pudjiastuti, T. N., Alami, A. N., Farhana, F., & Arfan. (2023). Access to Education for Refugee Children in Indonesia During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Adaptation Strategies. *Advance in Southeast Asian Studies*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0089>
- Puspita, N. Y. (2024). Revisiting State Sovereignty Interpretation in Managing Rohingya Refugee Arrivals Amid the covid-19 Pandemic in Indonesia. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 25(2), 127–152. <https://doi.org/10.1163/15718158-25020002>
- Rumiarta, I. N. P. B., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2023). Fulfilling Right to Education for Rohingya Refugee Children in Indonesia. *The Age of Human Rights Journal*, 21, e7659. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v21.7659>
- Segev, E. (2020). Textual network analysis: Detecting prevailing themes and biases in international news and social media. *Sociology Compass*, 14(4). <https://doi.org/10.1111/soc4.12779>
- Sha, N., Mani, B. S., Ganesh, B., Sankar Ganesh, Velmurugan, R., & Sudarvel, J. (2023). *Impact of Social Media on Government Operational Dynamics* (pp. 20–33). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7450-1.ch002>
- Sutkutė, R. (2019). Shaping of the Public Discourse on Refugees in Social Media: “Refugees Welcome Lithuania.” *EUREKA: Social and Humanities*, 1, 35–52. <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2019.00824>

- Syahrin, M., & Pangestu, B. (2019). Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2, 71–84.
- UNHCR. (2024). *Sekilas Data*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>
- Yılmaz, F., Elmas, T., & Eröz, B. (2023). Twitter-based analysis of anti-refugee discourses in Türkiye. *Discourse & Communication*, 17(3), 298–318. <https://doi.org/10.1177/17504813231169135>